

RENCANA KERJA



**BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai suatu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah selalu menggali dan mengembangkan semua potensi yang ada, terutama penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan nafas otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan otonomi daerah tersebut, memberikan implikasi bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk menuju Kabupaten Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan berdaya saing. Dengan kata lain, bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan daerah untuk mencukupi urusan rumah tangganya dan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan, tentunya kemampuan menyiapkan anggaran/keuangan merupakan prioritas utama yang perlu dipikirkan. Konsekuensi bagi setiap daerah harus memacu diri untuk meningkatkan kemandiriannya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah guna menopang anggaran belanja daerah. Untuk itu perlu diupayakan usaha yang maksimal dan menyeluruh, terpadu serta berkesinambungan melalui peningkatan kinerja dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan, maka Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan program dan kegiatannya guna memfasilitasi pelaksanaan

pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tertib, efektif, transparan, akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan melalui Rencana Strategis (Renstra) maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan (tahunan) yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja organisasi perangkat daerah pada tahun 2019, ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Sejalan dengan Misi ke-dua Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 yakni Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor, maka ditetapkanlah Visi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu ***“Terwujudnya Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”*** yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan ditahun 2019 yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana

Kerja Tahun 2019. Selanjutnya, Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan kabupaten pesisir selatan;
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
5. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
6. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaen/kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan negara/daerah;
8. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah;
9. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
11. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
12. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;

13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
14. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
15. Peraturan Bupati kabupaten pesisir selatan nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Badan Pendapatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk :

- a. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan tahun 2019 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di sektor pendapatan selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di sektor pendapatan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Badan Pendapatan Tahun 2018

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Tahun 2018 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan
- 1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan
- 1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pendapatan

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Tahun 2018 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan

Pelaksanaan Renja Kerja Badan 2017 dan perkiraan capaian pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pada tabel dipaparkan realisasi dari setiap kegiatan yang dilakukan Badan Pendapatan, untuk semua kegiatan sudah mencapai target yang ditentukan dengan realisasi setiap kegiatan sudah 100 %. Setiap kegiatan tidak selalu ada setiap tahunnya, karena ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya saja dan tidak dilakukan pada tahun ini. Setidaknya ada sebagian kegiatan yang hanya terdapat pada tahun tertentu. Sebagai contoh kegiatan yaitu pembuatan Ranperda yang hanya terdapat pada tahun 2017 saja, karena Badan Pendapatan baru berdiri pada akhir tahun 2016 sehingga kegiatan ini tidak muncul lagi pada tahun 2018. Ada beberapa kegiatan yang dihapuskan dan diganti dengan kegiatan baru seperti Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah diganti menjadi kegiatan Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I, II, dan III. Hal tersebut dikarenakan perlunya peninjauan lebih optimal lagi untuk pemungutan pajak daerah untuk setiap wilayah. Walaupun kegiatan diganti tetapi, hasil yang didapatkan sesuai dengan target yang diberikan bahkan target yang ingin dicapai melebihi dari tahun sebelumnya.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan dan Pencapaian Renstra Badan Pendapatan s/d Tahun 2018
Kabupaten Pesisir Selatan

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcome/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Badan Pendapatan) Tahun 2018	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017		Target Program dan Kegiatan (Renja Badan Pendapatan Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan Pendapatan s/d Tahun 2018			
				Target Realisasi Renja Badan Pendapatan Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
3 00 03 02	Penunjang Urusan Badan Pendapatan		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 00 03 02 01	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Telpon dan Air Badan Pendapatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan OPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 01 20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 01 22	Penunjang Operasional Pemenuhan dan Pelaporan	Terlaksananya Operasional Pemenuhan dan Pelaporan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 02 07	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Mesin Disedi	-	-	-	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 02 10	Pengadaan Meublier	Tersedianya Meublier Pendukung Operasional	-	-	meja, kursi eselon, kursi rapat, meja rapat	meja, kursi eselon, kursi rapat, meja rapat	100%	-	-	-
3 00 03 02 02 22	Peneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Peneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%

3 00 03 02 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 02 130	Persediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 05	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terseminuhnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	12 Bulan	100%	100%	-	-
3 00 03 02 06	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	-	100%	100%	100%	-	-
3 00 03 02 15	Program pengembangan Data/Informasi	Terseminuhnya Program Pengembangan Data/Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 15 11	Penyediaan Informasi Pembangunan	Terseminuhnya Program Pengembangan Program Pembangunan Kepada Masyarakat	12 Bulan	-	100%	100%	-	100%
3 00 03 02 17	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 17 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 17 30	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi PAD	4 Kali	5 Kali	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 17 31	Penyusunan Laporan PAD	Terlaksananya Penyusunan Laporan PAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 17 32	Cetak Masal dan Pengadaan Bahan-bahan Dokumen PBB-P2	Terseminanya Dokumen Pendukung PBB-P2	4 Paket	4 Paket	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 17 33	Pengadaan Barang Kусi	Terlaksananya Pengadaan Barang Kусi	1 paket	1 paket	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 17 35	Monitoring dan Evaluasi PBB-P2	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terhadap PBB-P2	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 17 36	Pendaftaran dan Verifikasi Nomor Objek Pajak PBB-P2	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Nomor Objek Pajak PBB-P2	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 17 40	Penunjang Sistem e-PAD	Terlaksananya Operasional Sistem e-PAD	-	12 Bulan	100%	100%	-	100%
3 00 03 02 17 44	Monitoring dan Evaluasi PAD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap PAD	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 17 46	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%

3 00 03 02 17 49	Penyusunan Data Pungutan PBB P2	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pungutan PBB P2	-	-	2 Kecamatan	100%	-	100%	100%
3 00 03 02 17 58	Rekonsiliasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 17 59	Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Umum	Terlaksananya Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Umum	-	-	1 Rancangan	100%	-	100%	100%
3 00 03 02 17 60	Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Usaha	Terlaksananya Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Usaha	-	-	1 Rancangan	100%	-	100%	100%
3 00 03 02 17 61	Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu	Terlaksananya Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	1 Rancangan	100%	-	100%	100%
3 00 03 02 17 62	Revisi Peraturan Daerah tentang Pajak BPHTB	Terlaksananya Revisi Mengenal Perda Pajak BPHTB	-	-	1 Perda	100%	-	100%	100%
3 00 03 02 17 63	Sosialisasi Pajak Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Mengenal Pajak Daerah	4 Kali	-	4 kali	100%	100%	100%	100%
3 00 03 02 17 64	Pemetaan Potensi Reklame	Terlaksananya Pemetaan Lokasi Mengenal Potensi Reklame	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%
3 00 03 02 17 66	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	Terlaksananya Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	100%	-	-	-	100%	100%	100%
3 00 03 02 17 67	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	Terlaksananya Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	100%	-	-	-	100%	100%	100%
3 00 03 02 17 68	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	Terlaksananya Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	100%	-	-	-	100%	100%	100%
3 00 03 02 17 87	Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya pemetaan potensi PAD	100%	-	-	-	100%	100%	100%
3 00 03 02 17 88	Verifikasi Penetapan Pajak Daerah	Diperolehnya data Penerimaan PBB P2 yang Akurat dan Terkini	100%	-	-	-	100%	100%	100%
3 00 03 02 17 89	Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Terlaksananya Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	100%	-	-	-	100%	100%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan

Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Tugas dan Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan pada prinsipnya mempunyai tugas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 dan Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel Tabel 2.2 sebagai berikut:

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan
Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (5)	Tahun 2018 (6)	Tahun 2019 (7)	Tahun 2020 (8)	Tahun 2017 (9)	Tahun 2018* (10)	Tahun 2019 (11)	Tahun 2020 (12)	
(1)	Percentase PAD dalam APBD	-	-	116.000.000.000	150.000.000.000	165.000.000.000	181.500.000.000	178.145.381.104	112.100.033.181	152.000.000.000	167.200.000.000	(13)

ket : * Realisasi sampai Tanggal 17 Desember 2018

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
2. Masih belum sempurnanya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Petunjuk Teknis, dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB-P2, BPHTB, yang dapat dijadikan acuan kerja agar memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ketatalaksanaan yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, karena institusi Badan Pendapatan baru terbentuk pada tahun 2016, yang didalamnya banyak pegawai dari luar yang baru masuk, sehingga belum terlalu menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai Badan Pendapatan tentang regulasi tersebut;
4. Belum terbentuknya budaya kerja dari seluruh pegawai Badan Pendapatan, karena Visi, Misi, Nilai-nilai, Strategi dan Kebijakan dari Badan Pendapatan baru disusun dalam Renstra pada tahun 2016 dan sekarang diperbaharui pada Renstra 2016-2021, sehingga belum disosialisasikan kepada seluruh pegawai Badan Pendapatan;
5. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota

- penjualan dan sisa karcis/bill/nota penjualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;
 7. Kurang optimalnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya mengurangi kebocoran Pajak Daerah seperti pemanfaatan sistem informasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2019 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Pesisir Selatan

Hasil Analisis Kebutuhan											Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PESSEL	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	617.753.351	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PESSEL	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	617.753.351	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PESSEL	Terperuhnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Telpin dan Air Badan Pendapatan	12 Bulan	58.080.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PESSEL	Terperuhnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Telpin dan Air Badan Pendapatan	12 Bulan	58.080.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	PESSEL	Terlaksananya Administrasi Keuangan OPD	12 Bulan	215.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	PESSEL	Terlaksananya Administrasi Keuangan OPD	12 Bulan	215.000.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PESSEL	Terlaksananya Kebersihan Kantor	12 Bulan	5.234.350	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PESSEL	Terlaksananya Kebersihan Kantor	12 Bulan	5.234.350	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PESSEL	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	31.225.382	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PESSEL	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	31.225.382	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PESSEL	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	26.400.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PESSEL	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	26.400.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PESSEL	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	17.798.044	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PESSEL	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	17.798.044	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PESSEL	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	5.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PESSEL	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	5.500.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	PESSEL	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	48.477.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	PESSEL	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	48.477.000	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	PESSEL	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	113.264.250	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	PESSEL	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	113.264.250	
	Rapat-rapat kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PESSEL	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan	64.053.000	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	PESSEL	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan	64.053.000	
	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	PESSEL	Terlaksananya Operasional Perencanaan dan Pelaporan	12 Bulan	32.721.325	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	PESSEL	Terlaksananya Operasional perencanaan dan Pelaporan	12 Bulan	32.721.325	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PESSEL	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan	100%	945.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PESSEL	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan	100%	945.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	PESSEL	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit Sepeda Motor	90.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	PESSEL	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit Sepeda Motor	90.000.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	PESSEL	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Printer, Scanner, PC, dan Mesin Penghancur Kertas	187.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	PESSEL	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Printer, Scanner, PC, dan Mesin Penghancur Kertas	187.000.000	
	Pengadaan Meubler	PESSEL	Tersedianya Meublier Pendukung Operasional		23.000.000	Pengadaan Meublier	PESSEL	Tersedianya Meublier Pendukung Operasional		23.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PESSEL	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung kantor	40.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	PESSEL	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung kantor	40.000.000	

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	PESSEL	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit kendaraan Roda 4, dan 10 Unit kendaraan Roda 2	130.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	PESSEL	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit kendaraan Roda 4, dan 10 Unit kendaraan Roda 2	130.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	PESSEL	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	55.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	PESSEL	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	55.000.000
Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	PESSEL	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		400.000.000	Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	PESSEL	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		400.000.000
Rehabilitasi sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	PESSEL	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional		20.000.000	Rehabilitasi sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	PESSEL	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional		20.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	PESSEL	Terpanuhinya Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	-	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	PESSEL	Terpanuhinya Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	-
Pengadaan Pakalan Kerja Lapangan	PESSEL	Tersedianya Pakalan Kerja Lapangan	60 Pasang Pakalan Kerja Lapangan	-	Pengadaan Pakalan Kerja Lapangan	PESSEL	Tersedianya Pakalan Kerja Lapangan	60 Pasang Pakalan Kerja Lapangan	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PESSEL	Terpanuhinya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	90.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PESSEL	Terpanuhinya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	90.000.000
Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	PESSEL	Terlaksananya Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah		90.000.000	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	PESSEL	Terlaksananya Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah		90.000.000
Program Pengembangan Data/Informasi	PESSEL	Terpanuhinya Program Pengembangan Data/Informasi	100%	49.500.000	Program Pengembangan Data/Informasi	PESSEL	Terpanuhinya Program Pengembangan Data/Informasi	100%	49.500.000
Penyebarluasan Informasi Pembangunan	PESSEL	Terinformasinya Program Pembangunan Kepada Masyarakat		49.500.000	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	PESSEL	Terinformasinya Program Pembangunan Kepada Masyarakat		49.500.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	PESSEL	Terpanuhinya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	3.153.922.027	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	PESSEL	Terpanuhinya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	3.153.922.027
Penyusunan Laporan PAD	PESSEL	Terlaksananya Penyusunan Laporan PAD	Buku Laporan	81.399.848	Penyusunan Laporan PAD	PESSEL	Terlaksananya Penyusunan Laporan PAD	Buku Laporan	81.399.848
Pendataan dan Verifikasi Pajak Daerah	PESSEL	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Pajak Daerah	12 Bulan	176.528.440	Pendataan dan Verifikasi Pajak Daerah	PESSEL	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Pajak Daerah	12 Bulan	176.528.440
Pengadaan Barang Kuasi	PESSEL	Terlaksananya Pengadaan Barang Kuasi	100%	120.000.000	Pengadaan Barang Kuasi	PESSEL	Terlaksananya Pengadaan Barang Kuasi	100%	120.000.000
Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	PESSEL	Diperolehnya data Penerimaan PBB-P2 yang Akurat dan Terkini	800 Berkas BPHTB, 100 SKP Reklame	145.280.568	Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	PESSEL	Diperolehnya data Penerimaan PBB-P2 yang Akurat dan Terkini	800 Berkas BPHTB, 100 SKP Reklame	145.280.568
Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	PESSEL	Terlaksananya Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	175877 SPPT PBB-P2, 35 Hotel dan Cottage, 65 Restoran/Rumah Makan	269.999.000	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	PESSEL	Terlaksananya Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	175877 SPPT PBB-P2, 35 Hotel dan Cottage, 65 Restoran/Rumah Makan	269.999.000

Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	PESEL	Terlaksananya Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	190.000.000	81226 SPPT PBB-P2, 5 Hotel dan Cottage, 30 Restoran/Rumah Makan	190.000.000	81226 SPPT PBB-P2, 5 Hotel dan Cottage, 30 Restoran/Rumah Makan	Terlaksananya Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	190.000.000
Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	PESEL	Terlaksananya Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	200.000.000	33256 SPPT PBB-P2, 25 Hotel dan Cottage, 35 Restoran/Rumah Makan	200.000.000	33256 SPPT PBB-P2, 25 Hotel dan Cottage, 35 Restoran/Rumah Makan	Terlaksananya Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	200.000.000
Sosialisasi Pajak Daerah	PESEL	Terlaksananya Sosialisasi Mengenai Pajak Daerah	Sosialisasi Pajak Daerah	13.000.000	4 kali	13.000.000	4 kali	Terlaksananya Sosialisasi Mengenai Pajak Daerah	13.000.000
Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	PESEL	Terlaksananya rekonsiliasi PAD	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	67.421.694	12 kali	67.421.694	12 kali	Terlaksananya rekonsiliasi PAD	67.421.694
Monitoring dan Evaluasi PAD	PESEL	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PAD	Monitoring dan Evaluasi PAD	144.000.000	15 Laporan	144.000.000	15 Laporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PAD	144.000.000
Pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah	PESEL	Terlaksananya pemetaan potensi PAD	Pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah	235.000.000	1 Jenis Buku	235.000.000	1 Jenis Buku	Terlaksananya pemetaan potensi PAD	235.000.000
Cetak massal dan pengadaan Bahan-bahan dokumen PBB-P2	PESEL	Tersedianya dokumen pendukung PBB-P2	Cetak massal dan pengadaan Bahan-bahan dokumen PBB-P2	322.592.477	SPPT, DHKP, STTS, TTS	322.592.477	SPPT, DHKP, STTS, TTS	Tersedianya dokumen pendukung PBB-P2	322.592.477
Zonasi nilai jual objek pajak	PESEL	Terlaksananya Zonasi nilai jual objek pajak	Zonasi nilai jual objek pajak	518.700.000	5 kecamatan	518.700.000	5 kecamatan	Terlaksananya Zonasi nilai jual objek pajak	518.700.000
Pengadaan sarana reklame	PESEL	Tersedianya sarana reklame	Pengadaan sarana reklame	325.000.000		325.000.000		Tersedianya sarana reklame	325.000.000
Penunjang sistem informasi pengelolaan pajak daerah	PESEL	Terlaksananya penunjang sistem informasi pengelolaan pajak daerah	Penunjang sistem informasi pengelolaan pajak daerah	25.000.000		25.000.000		Terlaksananya penunjang sistem informasi pengelolaan pajak daerah	25.000.000
Penyusunan sitem operasional dan prosedur	PESEL	Terlaksananya penyusunan sistem operasional dan prosedur	Penyusunan sitem operasional dan prosedur	100.000.000		100.000.000		Terlaksananya penyusunan sistem operasional dan prosedur	100.000.000
Verifikasi dan validasi piutang PBB-P2	PESEL	Terlaksananya verifikasi dan validasi piutang PBB-P2	Verifikasi dan validasi piutang PBB-P2	220.000.000		220.000.000		Terlaksananya verifikasi dan validasi piutang PBB-P2	220.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat nagari yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementerian Keuangan *"Kami akan menjadi Penggerak utama Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21"* Pada negara berkembang, pertumbuhan ekonomi cenderung tumbuh dibandingkan negara maju yang sudah mencapai level ekonomi yang tinggi dan cenderung stagnan. Dalam rentang satu abad ini, yakni dasawarsa ke-1 atau abad ke 21, Kementerian Keuangan memacu institusi agar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, artinya target Kementerian Keuangan adalah menjadikan ekonomi Indonesia terus tumbuh terhitung pada abad 21. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi diusahakan dalam misi-misi Kementerian Keuangan dan pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor ; Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Sumber Daya Alam, Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Faktor Budaya, dan Sumber Daya Modal.

Kementerian Keuangan berperan dalam pengelolaan kekayaan negara. Baik yang merupakan pendapatan negara pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Dana yang terkumpul ini dianggarkan pada setiap kementerian dengan persentase yang berbeda-beda sesuai putusan pemerintah. Pengumpulan dana dalam kas negara ini agar lebih bermanfaat lagi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam pemerataan.

Kondisi investasi Indonesia yang masih berpotensi untuk diperbaiki membawa peluang untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pendapatan Negara dan sekaligus meningkatkan daya saing produksi dalam negeri serta meningkatkan investasi melalui kebijakan harmonisasi tarif dan pemberian intensif berupa stimulus perpajakan. Upaya penerimaan perpajakan dan pertumbuhan ekonomi nasional dilakukan melalui pemberian intensif fiskal pada program konversi penggunaan BBM untuk listrik ke penggunaan terbarukan khususnya energi panas bumi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di tahun-tahun silam sangatlah kompleks dan memerlukan kerja keras bagi segenap elemen yang ada untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi, berkaitan dengan kondisi krisis ekonomi dan sosial yang telah menjadi krisis multi dimensi di tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah. Krisis multi dimensi ini menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Blitar sampai dengan saat ini, yang antara lain adalah tingginya angka pengangguran dan rendahnya pendapatan perkapita masyarakat. Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sektor pendapatan saat ini ditangani oleh 24 (Dua puluh empat) orang PNS, dengan wilayah meliputi seluruh kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 15 Kecamatan
2. Kebutuhan akan pembentukan UPTD sangatlah urgen, namun kesiapan kelembagaan, tenaga, sarana dan prasarana, dan Badan Pendapatan yang baru terbentuk, tentunya lebih urgen bila menata kedalam terlebih dahulu, tanpa mengkesampingkan mempersiapkan kebutuhan pembentukan dari UPTD tersebut.
3. Dengan adanya pengalihan PBB-P2 yang semula pajak pusat menjadi pajak daerah dengan lebih kurang 175.877 obyek pajak yang tersebar di 15 kecamatan dan 182 nagari dibanding dengan ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang ada saat ini dirasa belum memadai, tentunya membutuhkan penataan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Tingginya angka pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, yang disebabkan oleh adanya krisis multi dimensi, yang sedikit banyak akan mempengaruhi hasil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga diperlukan suatu pemikiran yang brilian untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi lebih baik/ tinggi, minimal sama dengan tahun yang lalu.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan. Pada saat ini yang menjadi program prioritas di Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah masalah pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penerimaan PAD
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
3. Efisiensi Pengelolaan Pendapatan PAD

Melihat hal tersebut, maka di rencanakan program prioritas dengan program – program yang tepat sasaran seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sedangkan sasaran Rencana kerja Tahun 2019 adalah :

1. Meningkatkan Pengawasan Penerimaan PAD
2. Meningkatkan Kualitas Data PAD
3. Meningkatnya Kualitas Penagihan PAD
4. Meningkatnya Kualitas SDM Pemungut dan Pelayanan Pajak
5. Meningkatnya Sarana Penunjang Pelayanan
6. Tersedianya Peraturan Pengelolaan Pajak Daerah
7. Meningkatnya Laporan PAD yang Akurat

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi.

Dalam renstra Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016- 2021, program dan kegiatan dikategorikan kedalam program/kegiatan

lokalitas OPD. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 dan perkiraan maju tahun 2019. Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut :

[illegible]

3 00 03 02 15	Program Pengembangan Data/Informasi	Terperuhnya Program Pengembangan Data/Informasi	Badan Pendapatan	100%	49.500.000	100%	54.450.000
3 00 03 02 15	11 Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terinformasinya Program Pembangunan Kepada Masyarakat	Badan Pendapatan		49.500.000		54.450.000
3 00 03	KEUANGAN						
3 00 03 02 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terperuhnya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan	100%	3.153.922.027	100%	3.469.314.230
3 00 03 02 17	21 Penyusunan Laporan PAD	Terlaksananya Penyusunan Laporan PAD	Badan Pendapatan	Buku Laporan	81.399.848	Buku Laporan	89.539.833
3 00 03 02 17	31 Pendataan dan Verifikasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Pajak Daerah	Badan Pendapatan	12 Bulan	176.528.440	12 Bulan	194.181.284
3 00 03 02 17	33 Pengadaan Barang Kuasi	Terlaksananya Pengadaan Barang Kuasi	Badan Pendapatan	100%	120.000.000	100%	132.000.000
3 00 03 02 17	43 Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	Diperolehnya data Penerimaan PBB-P2 yang Akurat dan Terkini	Badan Pendapatan	800 Berkas BPHTB, 100 SKP Reklame	145.280.568	800 Berkas BPHTB, 100 SKP Reklame	159.808.625
3 00 03 02 17	50 Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	Terlaksananya Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	Badan Pendapatan	175.877 SPPT PBB-P2, 35 Hotel dan Cottage, 65 Restoran/Rumah Makan	269.999.000	175.877 SPPT PBB-P2, 35 Hotel dan Cottage, 65 Restoran/Rumah Makan	296.998.900
3 00 03 02 17	51 Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	Terlaksananya Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	Badan Pendapatan	81.226 SPPT PBB-P2, 5 Hotel dan Cottage, 30 Restoran/Rumah Makan	190.000.000	81.226 SPPT PBB-P2, 5 Hotel dan Cottage, 30 Restoran/Rumah Makan	209.000.000
3 00 03 02 17	52 Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	Terlaksananya Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	Badan Pendapatan	33.256 SPPT PBB-P2, 25 Hotel dan Cottage, 35 Restoran/Rumah Makan	200.000.000	33.256 SPPT PBB-P2, 25 Hotel dan Cottage, 35 Restoran/Rumah Makan	220.000.000
3 00 03 02 17	53 Sosialisasi Pajak Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Mengenai Pajak Daerah	Badan Pendapatan	4 kali	13.000.000	4 kali	14.300.000
3 00 03 02 17	66 Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi PAD	Badan Pendapatan	12 kali	67.421.694	12 kali	74.163.863
3 00 03 02 17	75 Monitoring dan Evaluasi PAD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PAD	Badan Pendapatan	15 Laporan	144.000.000	15 Laporan	158.400.000

3 00 03 02 17	78	Pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya pemetaan potensi PAD	Badan Pendapatan	1 Jenis Buku	235.000.000		1 Jenis Buku	258.500.000
3 00 03 02 17	80	Cetak massal dan pengadaan Bahan-bahan dokumen PBB-P2	Tersedianya dokumen pendukung PBB-P2	Badan Pendapatan	SPPT, DHKP, STTS, TTS	322.592.477		SPPT, DHKP, STTS, TTS	354.851.725
3 00 03 02 17	94	Zonasi nilai jual objek pajak	Terlaksananya Zonasi nilai jual objek pajak	Badan Pendapatan	5 kecamatan	518.700.000		5 kecamatan	570.570.000
3 00 03 02 17	95	Pengadaan sarana reklame	Tersedianya sarana reklame	Badan Pendapatan		325.000.000			357.500.000
3 00 03 02 17	96	Penunjang sistem informasi pengelolaan pajak daerah	Terlaksananya penunjang sistem informasi pengelolaan pajak daerah	Badan Pendapatan		25.000.000			27.500.000
3 00 03 02 17	97	Penyusunan sistem operasional dan prosedur	Terlaksananya penyusunan sistem operasional dan prosedur	Badan Pendapatan		100.000.000			110.000.000
3 00 03 02 17	98	Verifikasi dan validasi piutang PBB-P2	Terlaksananya verifikasi dan validasi piutang PBB-P2	Badan Pendapatan		220.000.000			242.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN

Program Badan Pendapatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Badan Pendapatan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Pendapatan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Rencana Program, Kegiatan, dan Pagu Indikatif

Kode		Uraian	Pagu Kebutuhan Dana
Program	Kegiatan		
1	2	3	4
(3.00) - PENUNJANG URUSAN			
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		617.753.351
	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.080.000
	07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	215.000.000
	08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.234.350
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.225.382
	11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.400.000
	12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.798.044
	15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000
	17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	48.477.000
	18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	113.264.250
	19.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	64.053.000
	30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	32.721.325
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		945.000.000
	05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	90.000.000
	09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	187.000.000
	10.	Pengadaan Meubiler	23.000.000
	22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	40.000.000
	24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	130.000.000
	28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	55.000.000
	42.	Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	400.000.000
	44.	Rehabilitasi sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	20.000.000
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-
	03.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		90.000.000
	07.	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	90.000.000
(3.00.02.) - PERENCANAAN			
15.	Program Pengembangan Data/Informasi		49.500.000
	11.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	49.500.000
(3.00.03.) - KEUANGAN			
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		3.153.922.027
	21.	Penyusunan Laporan PAD	81.399.848
	31.	Pendataan dan Verifikasi Pajak Daerah	176.528.440
	33.	Pengadaan Barang Kuasi	120.000.000
	43.	Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	145.280.568
	50.	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah I	269.999.000
	51.	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II	190.000.000
	52.	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah III	200.000.000
	63.	Sosialisasi Pajak Daerah	13.000.000
	68.	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	67.421.694
	75.	Monitoring dan Evaluasi PAD	144.000.000
	78.	Pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah	235.000.000
	80.	Cetak massal dan pengadaan Bahan-bahan dokumen PBB-P2	322.592.477
	94.	Zonasi nilai jual objek pajak	518.700.000
	95.	Pengadaan sarana reklame	325.000.000
	96.	Penunjang sistem informasi pengelolaan pajak daerah	25.000.000
	97.	Penyusunan sistem operasional dan prosedur	100.000.000
	98.	Verifikasi dan validasi piutang PBB-P2	220.000.000

BAB V PENUTUP

Penyusunan rencana kinerja organisasi perangkat daerah (Renja OPD) ini tidak terlepas dari tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan. Proses penyusunan Renja OPD ini memerlukan keterlibatan semua pihak, sehingga semua komponen dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ikut terwakili dan bertanggung jawab terhadap program kerja yang direncanakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2019.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Semoga Renja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPETEN PESISIR SELATAN**

DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19731230 199403 1 003